

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

(Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

M. MA'SHUM RIDHO

NPM : 1221010001

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. MA'SHUM RIDHO
NPM 1221010001**

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

Pembimbing I : Drs. Haryanto H, M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Jalaluddin, S.H., M.M.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)

**Oleh :
M. MA'SHUM RIDHO**

Adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama mengenai biaya nikah diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA.

Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan untuk mengetahui Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data kemudian diolah dengan cara editing, klasifikasi data dan sistematika data, kemudian data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 meliputi sosialisasi peraturan biaya nikah secara maksimal yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat direspon baik oleh masyarakat di tingkat kelurahan, implementasi peraturan dengan serius melalui berbagai cara yaitu pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Pembayaran PNBP melalui BRI, menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA dan meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan membangun integritas. Dampak dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat meliputi Biaya Nikah yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA. masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan Januari - Desember 2016 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat relatif terjangkau.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : M. Ma'shum Ridho

NPM : 1221010001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : AhwalAsy-Syakhshiyah

Judul skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, November 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Haryanto, H. M.H.
NIP.195612051983031002

Drs. H. Jalaluddin, S.H., M.M.
NIP.195703051978031001

Mengetahui,
Ketua Prodi AS

Marwin, S.H., M.H
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)** disusun oleh **M. Ma'shum Ridho Npm 1221010001**, Jurusan **Ahwal Asy-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Jumát/10 November 2017 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah dan Hukum**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua	: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Dharmayani, S.H.I., M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Khairuddin, M.H.	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Haryanto H, M.H.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

تَنْتَزِعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَلَا مَرِ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ إِلَهِ فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
(تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ النِّسَاءِ : ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59).¹

¹Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 114

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Drs. H. Mislan, M.H. dan Ibunda Dra. Ismiwati, M.H. atas segala pengorbanan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Adik-adikku tersayang, Muhammad Yusuf Ramadhani, Alia Azizah dan Zakiyyah Nabilah yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Kakek, Nenek, Paman, Bibi, serta saudara-saudaraku yang senantiasa mendo'akanku dalam menuntut ilmu.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

M. Ma'shum Ridho, dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1995, di Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung. Putrakedua dari 5bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Drs. H. Mislán, M.H. dan Ibu Dra. Ismiwati, M.H.

Pendidikan dimulai dari Pondok Pesantren TKAl-Qurán Mambaul Hisan Sidoharjo, Pringsewu pada tahun 1999, selesai pada tahun 2002. Melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 4 Sidodadi Way Limaselesaipada tahun 2006. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts Negeri 1 Tanjungkarang, selesai pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di MA Negeri 1 Model Bandar Lampung, selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di IAIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Ahwalus As-Syakhsyah pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag
2. Pembimbing I dan Pembimbing II Drs. H. Haryanto, H. M.H. dan
Drs. H. Jalaluddin, S.H., M.M. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Tim penguji sidang munaqasyah H. Rohmat, S.Ag, M.H.I., Dharmayani,
S.H.I, M.Sy., Dr. H. Khairuddin, M.H., Drs. H. Haryanto H, M.H. yang telah

meluangkan waktu dan berkenan menguji skripsi penulis, serta mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan juga memotivasi guna perbaikan dalam pembuatan skripsi ini.

4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Marwin S.H., M.H. dan Gandhi Liyorba Indera, M.Ag.yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
5. Kanda Muhammad Ikbal, S.H., M.H. yang telah membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik,danmemotivasi, sertastaf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukumserta karyawan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Segenap guruku di TK,SD, Mts dan MA yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kasih sayang.
9. Kepala KUA Tanjungkarang Pusat Drs. H. Muhyidin, M.Ag. selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaikkuRandy Kurniawan, Agung Handi Priyatama, Wangsit Abdul Latif, Harun Fadli, Pandu Febrian, Zulhaqqi, Inayatul Syarifah, Febrimayanti, Abdul Aziz, Erlan El-Darius, Zuljalali Walikrom, Abdul Hamid, Ahmad Fauzan, Heri Maheri, Syaifulloh, Firmansyah dan

seluruh teman-teman seperjuangankuAS angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas canda, tawa, motivasi, serta dukungan kalian selama ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman dan Hukum Perdata Indonesia maupun Perdata Agama.

Bandar Lampung, November 2017
Penulis,

M. Ma'shum Ridho
NPM.1221010001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian	13
2. Dasar Hukum	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
B. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	28
1. Syarat Materiil dalam Perkawinan	28
2. Syarat Formil dalam Perkawinan	31
3. Pengaturan tentang Biaya Nikah	33
C. Administrasi Perkawinan dan Pelayanan Prima	35
1. Administrasi Perkawinan	35
2. Pelayanan Prima	42
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	50
1. Pengertian	50
2. Dasar Hukum	53

BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Pelaksanaan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung	78

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama	85
B. Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung	94

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Pelaksanaan adalah perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan, dan sebagainya).²
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Selanjutnya disingkat dengan PNBP) adalah suatu penerimaan yang diterima oleh Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara, serta penerimaan Negara bukan pajak lainnya.³
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 (selanjutnya disingkat dengan PP PNBP) adalah peraturan pemerintah yang berkenaan dengan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang tercantum dalam PP PNBP.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm. 393.

² *Ibid*, hlm. 261.

³ Lihat Salinan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

⁴ Lihat Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu upaya untuk memahami tentang diberlakukannya PP PNBPN tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif penulis ingin membahas dan mengkaji secara lebih dalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah biaya pernikahan yang tercantum dalam PP PNBPN bahwa tidak adanya beban biaya terhadap pihak yang ingin melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat dengan KUA), sedangkan secara nyata di lapangan masyarakat masih enggan untuk melaksanakan pernikahan di KUA.
2. Alasan subyektif pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah, dan adanya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti tersedianya sumber dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

C. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah. Karena pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Islam, maka harus dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S : An-Nur : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur : 32)⁶

Berdasarkan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa menikah sesuatu yang yang disukai oleh-Nya. Allah juga memerintah untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut, karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauhkan dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik itu berupa yang bersifat fasilitas maupun tidak.⁷

Pernikahan merupakan karunia Allah dan sunnah Rasullulah. Bahkan dalam Islam dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1997, hlm.14.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Penerbit Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 549.

merupakan kebutuhan manusia. Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan,⁸ serta tujuan dari perkawinan itu sendiri merupakan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi¹⁰ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لِبَاءَةً فَايْتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

*Artinya : dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda "wahai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*¹¹

Menurut Fuqaha menyebutkan bahwa pada nikah diberlakukan hukum yang 5 (lima), sehingga bisa jadi dalam satu keadaan hukumnya wajib, pada keadaan lain hukumnya sunnah atau mubah, bahkan terkadang makruh atau haram.¹² Al-Qur'an dan Hadits hanya mengatur substansinya saja, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut : Dar-Ibn Abbud, 2004), hal 131

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 61.

⁹ Misbah dan Abdul Rasul, *Membina Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, hlm. 11.

¹⁰ Al-Hafizh Zaki Al-Din Al-Mundziri, *Mukhtashar Hadist Shahih Muslim*, P.T Mizan Pustaka, Bandung, 2013, hlm. 444.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih bahasa A.Hassan), CV. Diponegoro, Bandung, 2011, hlm. 431.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih bahasa Sulaiman Al-Faifi), Senja Media Utama, Jawa Barat, 2017, hlm 359.

tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/ wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

Biaya pencatatan nikah dan rujuk atau biasa disingkat NR, secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp.30.000,- perperistiwa. Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan diluar KUA tidak diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut. Karena permintaan masyarakat yang menghendaki adanya pernikahan di luar kantor KUA bahkan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau wakil PPN (penghulu) memerlukan biaya tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Pungutan-pungutan inilah yang dinilai liar dan tidak memiliki payung hukum yang memadai.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya berkenaan dengan tidak adanya payung hukum terhadap PPN tentang biaya pencatatan maka pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp.0,00,- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan diluar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,-. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0.00,- (nol rupiah). Kemudian pada bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun, gunanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dimana jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Diterbitkannya PP PNBP disambut dengan hangat oleh masyarakat dan pihak KUA Kota Bandar Lampung. Khususnya pada pegawai PPN/Wakil PPN KUA Tanjungkarang Pusat terhindar dari tuduhan gratifikasi, dan tentunya dengan diterbitkannya PP PNBP maka akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Fakta bahwa dalam pelaksanaannya permintaan pernikahan pasangan calon pengantin yang di

laksanakan di KUA sangat minim sekali, padahal sudah di jelaskan dalam PP PNBP bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan di KUA di kenakan biaya nol rupiah.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai penerimaan Negara bukan pajak dimana dikhususkan mengenai jenis tarif terhadap biaya nikah di lingkungan KUA dan kaitannya dengan animo masyarakat untuk menikah di KUA dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama” (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ?
2. Bagaimana Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini adalah :

- a. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis Pelaksanaan Penetapan Biaya Nikah di KUA Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

- b. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama di lingkungan KUA Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mendapatkan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam disiplin ilmu syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di

lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹³

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, masyarakat yang telah melakukan pernikahan di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung. Penulis juga melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli). Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil wawancara dengan penghulu yang telah melaksanakan pernikahan di luar dan di dalam KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung. Serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar

¹³ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*-Cet.VII, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm.36

Lampung.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.¹⁴ Data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data berupa seperti buku, denah lokasi, visi misi KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dan sumber data lain yang diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dan masyarakat di Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang telah melaksanakan pernikahan diluar dan didalam KUA. Pelaksanaan wawancara dengan Kepala KUA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Analisis PP Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data

¹⁴*Ibid*, hlm. 43.

hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Pelaksanaan PP PNBP tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data awal di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dan berupa data hasil penelitian yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek (orang, kelompok, penduduk) yang dimaksudkan untuk diselidiki atau diteliti.¹⁶

Populasi yang dimaksud dalam penelitian merupakan narasumber yang ada dalam penelitian yakni kepala KUA Tanjungkarang Pusat dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan baik di KUA Tanjungkarang Pusat maupun di luar KUA Tanjungkarang Pusat yang berjumlah 461 pasangan calon pengantin.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 29.

yang dianggap bisa mewakili populasi. Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Setelah editing selesai selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis ini penulis menggunakan metode *deskriptif*. Teknik analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dan untuk menyimpulkan data di lapangan yaitu di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung yang berhubungan dengan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Kata nikah atau *ziwaj* adalah bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan “kawin”. Nikah atau perkawinan menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam Kitabnya *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* memiliki 3 (tiga) pengertian yakni makna *lugawi*, *ushuli* dan *fiqh*.¹

Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy menjelaskan bahwa nikah atau perkawinan secara *lugawi* (etimologi) nikah berarti “*al-wath'u wa ad-dhammu*” (bersenggama atau bercampur). Dalam hal ini dikatakan “*tanakahat al-asyjar*” (terjadi perkawinan antara kayu-kayu), yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain. Begitu pula dalam pengertian *majazi* (kiasan) orang menyebut nikah untuk arti *akad*, sebab akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan. Tentang makna *ushuli* ada perbedaan pendapat antara para Ulama, pertama mengatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersetubuh), mereka memberikan contoh Firman Allah Azza Wa Jalla (QS. Al-Baqarah : 230) :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة : ٢٣٠)

¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm. 1.

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah : 230)

Kata kawin (hingga ia kawin dengan suami yang lain) dalam ayat ini diartikan kawin dan telah melakukan senggama. Oleh sebab itu, dalam masalah nikah tahlil, Rasulullah SAW melarang hanya semata-mata akad, tetapi harus sampai bersenggama, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 223

نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة : ٢٢٣)

“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Dari pendapat pertama tentang nikah di atas, pendapat kedua menjelaskan arti hakikat nikah itu adalah akad, sedang arti majaz (kiasannya) adalah bersenggama. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa arti hakikat dari nikah ini *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama.²

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pengertian perkawinan berdasarkan UU Perkawinan. Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada

² Ibid, hlm. 2-3.

hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.³

Menurut Wantjik Saleh mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan terakhir tidak dapat ditempuh lagi.⁴

Lebih lanjut Wantjik Saleh mengatakan bahwa mengingat tujuan ini maka dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir dan ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri. Sebaliknya suatu ikatan bathin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata, tatapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁵

Menurut Amir Syarifuddin mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Pengertian perkawinan mengandung makna bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, hl ini menolak perkawinan sesama jenis. Perkawinan juga adalah bertemunya 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.⁶

Menurut Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ada beberapa tujuan perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, dimana keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia;
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, dimana keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup mengandung pengertian bahwa penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar kerkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 9.

⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.15.

⁵ *Ibid*, hlm.16.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 40.

bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁷

Tujuan perkawinan didalam ajaran Islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Ruum : 21) :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum : 21).

Tujuan perkawinan pada QS. Ar-Ruum tersebut di atas, menunjukkan fungsi perkawinan merupakan tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cita kasih. Atas dasar itulah Islam menetapkan hak dan kewajiban kepada suami isteri. Islam mengingatkan suami isteri adaah amanat dari Allah SWT, yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, istri dapat berperan sebagai penghibur hati dan pelepas rindu yang dapat memberikan ketenangan dan mengembalikan semangat jiwa. Dengan demikian, melakukan perkawinan dapat memperoleh ketenangan hidup dan memperbarui semangat jiwa untuk dapat meningkatkan ibadah dengan tujuan yang baik dan berpahala.

Tujuan perkawinan juga untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan peyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari berkeluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi

⁷ *Ibid*, hlm. 47.

Muhammad SAW yakni umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 71 dan QS. An-Nisaa ayat 1

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ (النحل : ٧٢)

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.” (QS. An-Nahl : 72).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء : ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisaa : 1)

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam Hadist Nabi :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَنْزُوجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristri, hendaklah ia kawin; karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata (dari memandang wanita yang bukan keluarga) dan tangguh menjaga alat vital. Barang siapa yang tak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat penahanan nafsu birahi”(dikeluarkan dari HR. Muslim dalam Kitab Nikah).⁸

⁸ Ahmad Razak dan Rais Lathief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1980), hlm. 164.

Selain dari 2 (dua) hal tersebut di atas, maka tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan Negaranya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dan tujuan perkawinan adalah suatu ikatan hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir, selain itu perkawinan juga bertujuan untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum Negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau hukum adat yang berlaku. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan sunatullah dimana pria dan wanita diikat

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2001, hlm. 7.

dengan aqad nikah yaitu ijab dan wabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum

Sebagaimana di uraikan di atas, yang menyatakan perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri setelah diikat dengan aqad nikah yakni ijab qabul yang sesuai dengan tata cara ajaran Islam. Melalui wahana perkawinan inilah kebutuhan biologis manusia terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam, menurut Islam tujuan perkawinan itu antara lain :

- a. Membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera;
- b. Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi;
- c. Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia;
- d. Membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal;
- e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Dasar perkawinan menurut ajaran Agama Islam menjelaskan bahwa yang pertama melaksanakan Sunnatullah seperti tercantum dalam Al-Qur'an (QS. An-Nuur : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: ٣٢)

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.....” (QS. An-Nuur : 32).

Kemudian yang kedua adalah untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dimaksud dalam hadist Nabi dalam HR. Ibnu Majah :¹⁰

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الزَّكَاءُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ أَلَا مِمَّ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dasar hukum perkawinan dalam agama Islam adalah perintah dari Allah SWT untuk umat manusia agar dilaksanakannya perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kemampuan atau persiapan untuk menikah sebagaimana dijelaskan di dalam QS. AN-Nuur ayat 32 dan Hadits dari HR. Ibnu Majah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Membahas perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat perkawinan bagi yang beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkawinan harus ada rukun perkawinan yang meliputi sebagai berikut :

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiyah, 275 H), hlm. 592.

- a. Calon istri;
- b. Calon suami;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul.

Menurut Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan bahwa rukun perkawinan meliputi sebagai berikut :

- a. *Sighat (aqad)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya, bernama, jawab pihak laki-laki (mempelai) “saya terima menikahi, karena maksudnya sama. Tidak sah aqad nikah melainkan dengan lafadz nikah atau tajwid atau terjemahan dari kedua. Menurut sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَأَعِزُّكُمْ خَذُوا مِنْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلِلْنَهُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.
(رواه مسلم)

Artinya :Telah berkata Rasulullah SAW :”takutlah kepada Allah SWT dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah SWT dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah SWT : HR. Muslim.

- b. Wali (wali si perempuan) keterangan sabda Rasulullah SAW yakni :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ. (رواه مسلم)

Artinya :“Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak di izinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal. : Hadits riwayat Nasai’.

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه)

Artinya :“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri.

- c. Adanya 2 (dua) orang saksi
Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه احمد)

Artinya :“tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan 2 (dua) orang saksi yang adil : Hadits diriwayatkan oleh HR. Ahmad.

Berdasarkan uraian hadits di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus lengkap rukun perkawinannya antara mempelai pria dan mempelai perempuan.

Selanjutnya dalam hukum perkawinan terdapat syarat-syarat perkawinan terutama syarat sahnya perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan UU Perkawinan, berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Kamal Muchtar mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah* artinya sesuatu perbuatan yang diperbolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan tidak juga diharamkan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32 :

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 23.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nuur : 32).

Abdurrahman dan Riduan Syahrani mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Lebih lanjut Abdurrahman dan Riduan Syahrani mengatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.¹³

Sudarsono mengatakan bahwa syarat sah perkawinan meliputi sebagai berikut :

- a. Syarat bakal suami :
 - 1) Islam;
 - 2) Lelaki yang tertentu;
 - 3) Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri;
 - 4) Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut;
 - 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah;
 - 6) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
 - 7) Tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu masa;
 - 8) Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri.
- b. Syarat bakal isteri :
 - 1) Islam;
 - 2) Perempuan yang tertentu;
 - 3) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami;

¹² Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 35.

¹³ *Ibid*, hlm. 35-36.

- 4) Bukan seorang khunsa;
 - 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah;
 - 6) Tidak dalam idah;
 - 7) Bukan isteri orang.
- c. Syarat wali :
- 1) Islam, bukan kafir dan murtad;
 - 2) Lelaki dan bukannya perempuan;
 - 3) Baligh;
 - 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan;
 - 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah;
 - 6) Tidak fasik;
 - 7) Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya;
 - 8) Merdeka;
 - 9) Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya.
- d. Syarat-syarat saksi :
- 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - 2) Islam;
 - 3) Berakal;
 - 4) Baligh;
 - 5) Lelaki;
 - 6) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul;
 - 7) Dapat mendengar, melihat dan bercakap;
 - 8) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil);
 - 9) Merdeka.
- e. Syarat Ijab :
- 1) Pernikahan nikah ini hendaklah tepat;
 - 2) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran;
 - 3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya;
 - 4) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti *muta'ah* (nikah kontrak (ikatan suami isteri) yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mutaah);
 - 5) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan).
- f. Syarat Qabul :
- 1) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab;
 - 2) Tiada perkataan sindiran;
 - 3) Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu);
 - 4) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak);
 - 5) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan);
 - 6) Menyebut nama bakal isteri;
 - 7) Tidak diselangi dengan perkataan lain.¹⁴

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 65.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Secara kodrati manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, untuk berpasang-pasangan sebagai suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam mengembangkan keturunan. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera dalam suatu perkawinan adalah merupakan tujuan luhur yang dilandasi segi-segi agama. Bahwa dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang tercantum sebagai lambang negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, oleh karenanya maka yang berbeda-beda dirangkaikan sedangkan yang sama dipersatukan dan sebagai sarana mempersatukan yang berbeda adalah falsafah negara Pancasila. Demikianlah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua

- yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak;
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
 - e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
 - f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁵

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal UU Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilaksanakan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai;
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum;
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :
 - 1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - 2) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan.
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.¹⁶

¹⁵ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Penjelasan Pasal 3 s/d Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa syarat perkawinan di Indonesia adalah bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas perjanjian yang disepakati kedua mempelai untuk melakukan perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku dan perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan secara resmi.

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 2 (dua) orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Sahnya perkawinan melalui beberapa persyaratan yang meliputi :

- a. Ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Untuk yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

B. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Syarat Materiil dalam Perkawinan

Membahas perkawinan tidak terlepas dari syarat materiil dalam perkawinan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Persetujuan Calon Mempelai

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan. Persetujuan calon mempelai dimaksudkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dimana ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kawin paksa, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan.

b. Batas Umur Perkawinan

Guna melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan. Jadi bagi pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

c. Perjanjian Perkawinan

Bedasarkan ketentuan Pasal 139-Pasal154 KUHPdata dikatakan bahwa “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat megnadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut tidak termasuk taklik talak.

Menurut hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, perbedaan tersebut sebagai berikut :

- 1) Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para Ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
- 2) Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
- 3) Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para Ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Rasulullah SAW merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
- 4) Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suaminya dan sebagainya. Sepakat para Ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
- 5) Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah *Mut'ah*) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhallil) atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah *syighar*). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah.¹⁷

2. Syarat Formil dalam Perkawinan

Membahas syarat formil dalam perkawinan tidak terlepas dari Tata cara perkawinan itu sendiri, dimana tata cara perkawinan meliputi sebagai berikut :

a. Pemberitahuan dan Pencatatan

Menurut ketentuan Pasal 50 KUHPdata menyatakan bahwa “semua roang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua pihak”. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat akta sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 51 KUHPdata.

Tentang pemberitahuan sebagaimana dijelaskan di atas, tidak diatur dalam ketentuan UU Perkawinan, melainkan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 54-56.

Mengenai pencatatan perkawinan, menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

b. Tata Cara dan Akta Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dalam praktiknya, dilakukan di salah satu tempat dari rumah kedua mempelai atau keluarganya, atau di kantor urusan agama dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan.

Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, artinya dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

c. Wali dan Saksi Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa diahdiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan.

d. Upacara Perkawinan

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundang-undangan, dimana kesemuanya itu diserahkan kepada para pihak yang ebsangkutan menurut agama masing-masing. Menurut agama Islam, upacara perkawinan hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yakni sighth (aqad), wali nikah dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan walimah atau perayaan perkawinan sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunnah (dianjurkan).

3. Pengaturan tentang Biaya Nikah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menjelaskan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dijelaskan sebagai berikut :

- a. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- c. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
- d. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

C. Administrasi Perkawinan dan Pelayanan Prima

1. Administrasi Perkawinan

Pada hakikatnya setiap kegiatan memerlukan administrasi. Ini berarti baik buruknya pencapaian tujuan setiap kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi. Administrasi dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan tata usaha yaitu pekerjaan yang bertalian dengan tulis menulis. Akan tetapi sebenarnya pengertian administrasi jauh lebih luas dari tata usaha.

Administrasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diistilahkan dengan pengertian Tata Usaha yaitu pekerjaan yang bertalian dengan tulis menulis, akan tetapi sebenarnya pengertian administrasi jauh lebih luas dari tata usaha.¹⁸

Sejalan dengan itu menurut Dwight Waldo yang dikutip Sarwoto mengemukakan hanya administrasi dalam pengertian modern adalah : Kegiatan manusia yang bekerjasama dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Ciri tingkat rasionalitas yang tinggi terletak pada kenyataan bahwa kerjasama manusia itu berbeda-beda dalam efektifitas dalam tercapainya tujuan, baik tujuan formil (tujuan dari pada pimpinan-pimpinan kerjasama itu) maupun tujuan-tujuan dari pada seluruh anggota yang mengadakan kerjasama itu.¹⁹

Sondang P. Siagian definisi administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰ Sejalan dengan itu menurut Dwight Waldo yang dikutip Sarwoto mengemukakan hanya administrasi dalam pengertian modern adalah : Kegiatan manusia yang bekerjasama dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Ciri tingkat rasionalitas yang tinggi terletak pada kenyataan bahwa kerjasama manusia itu berbeda-beda dalam efektifitas dalam tercapainya tujuan, baik tujuan formil (tujuan dari pada pimpinan-pimpinan kerja sama itu)

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 7.

¹⁹ Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 6.

²⁰ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 3.

maupun tujuan-tujuan dari pada seluruh anggota yang mengadakan kerjasama itu.²¹

Sementara itu Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang memberikan pengertian administrasi dalam 2 (dua) arti yakni :

- a. Dalam arti sempit, bahwa istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni administrasi adalah kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/ unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu.
- b. Dalam arti luas, bahwa istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris yakni *Administration*, yang dalam arti harafiah adalah :
 - 1) Memimpin, menguasai, mengendalikan, melaksanakan hukum;
 - 2) Melayani/mengatur kepentingan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan hukum, sebagai kekuasaan pemerintah guna mengatur kepentingan umum atau negara.²²

Selanjutnya dari uraian yang telah dikemukakan di atas, istilah administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan penetapan usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan, bukan hanya diartikan sebagai tata usaha.

Sebagai suatu proses, Sarwoto berpendapat bahwa Administrasi meliputi 2 (dua) segi utama yaitu segi statis dan dinamis. Segi statis berwujud wadah serta struktur segala hubungan formil antar personil dalam proses pencapaian tujuan, sedangkan segi dinamis berwujud keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kerja sama yang rasional dalam mencapai tujuan-tujuan.²³

Berdasarkan uraian di atas, pengertian administrasi mencakup usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kantor dan tata usaha.

Menurut Sarwoto mengatakan bahwa administrasi merupakan proses atau kegiatan kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan tata kerja tertentu yang

²¹ Sarwoto, *Op. Cit*, hlm. 6.

²² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Dasar-Dasar Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1994, hlm. 23.

²³ Sarwoto, *Op. Cit*, hlm. 8.

didalamnya mengandung pengurusan, bimbingan dan pengawasan. Adapun ciri-ciri administrasi adalah :

- a. Adanya kelompok manusia yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan atau proses tata usaha;
- d. Adanya bimbingan dan pengawasan;
- e. Adanya tujuan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka administrasi merupakan kegiatan untuk menata suatu kegiatan agar lebih sistematis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakikatnya setiap kegiatan manusia memerlukan administrasi sebagai bentuk pencapaian tujuan setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi.

Negara hukum menurut F.R. Bothlingk dalam bukunya Nomensen Sinamo mengatakan bahwa “*De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administrative aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*” (disatu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).²⁵

t A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens dalam bukunya Nomensen Sinamo, mengatakan bahwa Negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M.Hadjon, ide *rechtstaat* cenderung ke arah positivism hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.²⁶

Pada Negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Berkenaan dengan Negara hukum ini P.J.P Tak mengatakan sebagai berikut

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

²⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁶ *Ibid*, hlm. 33.

Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan Negara hukum, yakni Negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam suatu Negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Akhirnya, dalam suatu Negara hukum setiap warga Negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang”.²⁷

Sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam Negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Menurut J.B.J.M.Ten Berge, Administrasi Negara adalah sebagai “perpanjangan dari hukum tata Negara” atau sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa”. Atas dasar ini tampak bahwa keberadaan HAN seiring sejalan dengan keberadaan Negara hukum dan HTN. Oleh karena itu, menurut J.B.J.M.Ten Berge adalah salah paham menganggap Hukum Administrasi Negara sebagai fenomena yang relatif baru. Lebih lanjut J.B.J.M.Ten Berge mengatakan bahwa “ Hukum Administrasi Negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa, dengan kata lain Hukum Administrasi Negara, sebagaimana hukum Tata Negara, berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan.”²⁸

Meskipun Undang-undang dianggap sebagai sumber hukum administrasi Negara. Menurut Bagir Manan, Sementara itu mengomentari praktik administrasi Negara dengan mengutip Bagir Manan dimana sebagai ketentuan tertulis (*written rule*), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan terbatas sebagai moment opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyepat atau dipercepat.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 39.

²⁸ *Ibid*, hlm. 29.

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

Berdasarkan uraian di atas, lebih jauh oleh karena administrasi Negara dapat mengambil tindakan yang dianggap penting dalam pelayanan masyarakat, namun belum ada aturannya dalam undang-undang sehingga memungkinkan praktik administrasi Negara atau hukum tidak tertulis menjadi semakin pentingnya peranannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi Negara akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat. Hukum tidak tertulis yang lahir dari tindakan administrasi Negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi Negara.

Administrasi Negara adalah suatu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.³⁰

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa administrasi kependudukan merupakan suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi perkawinan atau pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akte kelahiran anak.

³⁰ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ada beberapa ketentuan dalam pencatatan pernikahan yang harus diketahui oleh para calon mempelai. Jika mempelai beragama selain Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil setempat, namun bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) lebih dahulu baru baru dicatatkan kemudian di catatan sipil. Administrasi perkawinan meliputi sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Pengantin masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- c. Surat Pengantar RT - RW setempat.
- d. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
- e. Pas photo calon pengantin ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota BRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas.
- f. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli beserta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
- g. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
 - 1) Calon Pengantin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

³¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 2) Calon pengantin Perempuan yang umurnya kurang dari 16 (enam belas) tahun;
- 3) Laki-laki yang mau berpoligami.
- h. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan. Bagi calon pengantin yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan lain).
- i. Harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- j. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
- k. Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat.

2. Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan salah satu bentuk produk dari birokrasi pemerintah yang bertindak sebagai organisasi publik. Kedudukan birokrasi adalah sebagai pelayanan, tugas pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa kecuali dan tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan undang-undang di atas, pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik, artinya tujuan diadakannya undang-undang pelayanan publik tersebut ditujukan untuk terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Jazim Hamidi dalam bukunya Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Pelayanan Primer adalah pelayanan yang paling mendasar;
- b. Pelayanan Sekunder adalah pelayanan pendukung;
- c. Pelayanan tersier adalah pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik.³²

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi di atas mengenai pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara maka Pelayanan Publik merupakan hak dasar bagi warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hal ini dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Mulai bergesernya *paradigm state oriented* kepada *public oriented* telah sedikit memberikan harapan bagi berjalannya perubahan, meskipun perubahan yang terjadi tidak lepas dari adanya tekanan publik yang

³² Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Pers, Malang, 2012, hlm. 31.

cukup serius bagi pemerintah untuk segera melakukan rekonstruksi paradigma dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan termasuk dalam penyediaan-penyediaan pelayanan publik.

Menurut Juniarso Ridwan dalam bukunya Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, ada beberapa hal terpenting dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik diantaranya :

- a. Faktor Hukum, hukum akan mudah ditegakkan, jika aturan atau undang-undang sebagai sumber hukum mendukung untuk terciptanya penegakan hukum.
- b. Faktor Aparatur Pemerintah, merupakan salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan pelayanan publik.
- c. Faktor Sarana;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.³³

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian pelayanan publik, dari kumpulan faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik sebagai implementasi kebijakan publik adalah mengenai isi (*content*) kebijakan, implementator dan kelompok target dan lingkungan.

Semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini, pelayanan publik yang ada masih jauh dari harapan, yaitu dapat diakses oleh setiap warga tanpa ada diskriminasi. Bahkan kini, pelayanan publik telah dijadikan instrumen oleh para pemodal untuk melakukan negosiasi pengadaan ataupun penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai contoh, pelayanan publik yang seringkali dijadikan komoditas bagi berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi dan fakta yang belum sesuai dengan kebutuhan serta perubahan di berbagai bidang kehidupan

³³ *Ibid*, hlm. 32.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan aparatur pemerintah didalam menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta rendahnya kesadaran hukum pejabat publik, juga disebabkan dampak dari berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Menurut Nomensen Sinamo mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta.³⁴

Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma ataupun dengan pembayaran. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat secara cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri. Pada umumnya pelayanan publik yang sering menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang perseorangan.

Hal ini dipahami, karena secara individual masing-masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Demikian pula, karakteristik yang dimiliki aparat pemberi pelayanan juga berpengaruh terhadap sikap dalam memberikan pelayanan.

³⁴ Nomensen Sinamo, *Op. Cit*, hlm. 64.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan sebagai bagian pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh Negara terhadap masyarakat, dengan kata lain pelayanan publik adalah salah satu bentuk produk dari birokrasi pemerintah yang bertindak sebagai organisasi publik. Kedudukan birokrasi adalah sebagai pelayanan, tugas pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa kecuali dan tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan bahkan untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh administrasi negara.

Excellent service atau disebut juga Pelayanan Prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan prima salah

satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan.

Adapun beberapa tujuan pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya.
- b. Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan, supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan.
- c. Menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang di tawarkan penjual.
- d. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan.
- e. Untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya.
- f. Supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik.
- g. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen, supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual.

Adapun beberapa fungsi pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini :

- a. Untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, sehingga pelanggan merasa puas.
- b. Untuk menciptakan suasana dimana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan.
- c. Untuk menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap produk ataupun jasa yang di jual.
- d. Untuk memuaskan pelanggan, supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan.
- e. Untuk menempatkan para pelanggan sebagai mitra bisnis.
- f. Untuk dapat memenangkan persaingan pasar.
- g. Dan untuk memberikan keuntungan yang maksimal.

Konsep pelayanan prima ada 3 (tiga) macam, dimana konsep pelayanan prima tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Konsep Sikap / *Attitude*

Sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri. Karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaan. Para konsumen atau pelanggan akan memberikan kesan pertama saat berhubungan langsung dengan orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut salah satunya yaitu pegawainya yang memberikan pelayanan. Kesuksesan suatu perusahaan jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam menjalankan perusahaan tersebut. Beberapa sikap yang diharapkan seperti sikap yang memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, mengabdikan kepada pekerjaan yang dilakukan, selalu menjaga citra baik perusahaan dan lain-lain. Tentunya pada konsep sikap ini pegawai pelayanan harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan yang harus diperhatikan juga pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan sesuai peraturan perusahaan.

b. Konsep Perhatian / *Attention*

Saat melakukan pelayanan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah ditawarkan maka segera layani dan tawarkan bantuan yang dia perlukan sehingga konsumen merasa diperhatikan, dan keinginannya dapat terpenuhi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep ini seperti mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan konsumen, memahami keinginan konsumen, melakukan pelayanan dengan ramah, tepat dan cepat serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama, karena konsumen adalah raja.

c. Konsep tindakan / *Action*

Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Jika pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli produk, maka segera layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan yang mungkin dia butuhkan supaya pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Beberapa bentuk pelayanan pada konsep ini misalnya seperti mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kembali yang di pesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan bisanya jika sudah melayani mengucapkan terimakasih kepada pelanggan.

Adapun karakteristik kualitas yang dimiliki pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini:

a. Penampilan

Penampilan sangat di perlukan untuk melakukan pelayan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Misalnya sebagai resepsionis maka harus memiliki tutur kata yang baik, berpenampilan yang menarik, memiliki tubuh yang proporsional, dan lain-lain.

- b. Kesopanan dan Ramah
Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan-santun, sabar, dan tidak egois karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial.
- c. Kesiapan Melayani
Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukannya.
- d. Pengetahuan dan Keahlian
Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Misalnya petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu maka jabatannya-pun harus yang sesuai dengan keahliannya.
- e. Tepat Waktu dan Janji
Dalam pelayanan maka pegawai dalam melakukan tugasnya jika membuat janji dengan pelanggan harus di perhitungan terlebih dahulu, apakah waktu dan janji tersebut bisa di tepati, misalnya mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam waktu kurun waktu 3 (tiga) hari maka harus dapat terpenuhi.
- f. Kejujuran dan Kepercayaan
Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Jika bersikap jujur maka petugas pelayanan dapat di percaya dari berbagai aspek misalnya dari segi perkataannya, sikapnya, dalam melakukan bekerja, dan lain-lain.
- g. Efisien
Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut. Sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil dari pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu efisien dan efektif merupakan hal yang harus di wujudkan dan harus menjadi perhatian serius dalam melakukan pelayanan.
- h. Kepastian Hukum
Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum yang jelas maka akan berpengaruh kepada sikap masyarakat, misalnya dalam pelayanan mengurus surat-surat berharga jika ditemukan ketidakpastian hukum maka

akan berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan atau pelayanan tersebut.

- i. Keterbukaan
Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan ijin, maka keterbukaan perlu di lakukan. Sikap keterbukaan itu akan berpengaruh pada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan.
- j. Biaya
Dalam pelayanan maka perlunya penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan, dan sesuai peraturan.
- k. Tidak Rasial
Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membedakan ras, suku, agama dan politik, jadi harus melayani secara merata.
- l. Kesederhanaan
Prosedur atau tata cara pelayanan kepada para pelanggan harus dipermudah dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan prima berperan sangat penting sekali bagi Negara dalam menjalankan pemerintahan. karena berpengaruh dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mengamankan masa depan bisnis perusahaan, sangat penting juga bagi staff perusahaan karena pelayanan prima dapat memberikan kebanggaan kepada mereka terutama pada perusahaan, dan produknya, dan sangat sangat penting juga bagi konsumen karena dapat memberikan informasi untuk mengambil keputusan dalam memilih dan membeli produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan maupun kebutuhannya.

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Wujud pendapatan negara (*government revenue*) berupa uang (*cash*) sebagai penerimaan negara, yang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, Penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Pengembalian Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 (dua) jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (selanjutnya disingkat PNBP). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis

PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui undang-undang.

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional serta mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai langkah kebijakan Negara dalam penegakan hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, yang mana pengelolaannya dan manfaatnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait biaya pernikahan yang mengatur tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Pasalnya, dimana sebelumnya pencatatan nikah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 membuka ruang terjadinya gratifikasi (yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, dimana gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik) terhadap petugas pencatatan pernikahan atau penghulu.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang termasuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kegiatan yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengatur tentang biaya nikah.

Ketentuan mengenai biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 mengatur mengenai pelaksanaan nikah dimana jika pernikahan dilakukan di luar Kantor Urusan Agama maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang ingin melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dimana semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan bersumber dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, pendapatan badan layanan umum (BLU) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

2. Dasar Hukum

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat dengan APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari :

- a. Penerimaan perpajakan;
- b. Penerimaan negara bukan pajak;
- c. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Definisi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.³⁵

³⁵ <http://www.google.com>, definisi perpajakan, diakses tanggal 22 Juni 2017.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000,- per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp.2.000.000,- maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).
- b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara
Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
- c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.
- d. Berdasarkan Undang-Undang
Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.³⁶

³⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dimaksud Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.³⁷

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 (empat) ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu:

- a. Pajak dari perspektif ekonomi
Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 (dua) situasi menjadi berubah, yaitu:
 - 1) Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
 - 2) Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
- b. Pajak dari perspektif hukum
Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.³⁸

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBPN dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.

³⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dijelaskan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan undang-undang penerimaan negara bukan pajak adalah :

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.³⁹

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;

- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian juga dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah penertiban, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

³⁹ *Ibid.*

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBPN yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional). Jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi:

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Adapun jenis-jenis PNBPN yang bersifat fungsional hanya terdapat pada kementerian negara/lembaga tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga jenis-jenis PNBPN antara kementerian negara/lembaga yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Seiring dengan semakin beragamnya jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak juga semakin bertambah. Misalnya,

pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional telah beberapa kali mengalami perubahan.

Kementerian Agama telah memiliki tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, dengan adanya pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, dan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, serta penyesuaian tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dimana seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Perguruan Tinggi Agama yang meliputi biaya seleksi ujian masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan biaya praktikum dikelompokkan dalam kategori-kategori dan pengaturan mengenai biaya nikah bagi warga negara yang tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 di atas, peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan penerimaan Negara bukan pada yang berlaku pada Kementerian Agama dan guna peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Berdasarkan Pasal 1, beberapa ketentuan dalam PP PNBPN tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa perubahan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penerimaan Negara bukan pajak dalam hal ini pengaturan tentang biaya nikah bertujuan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam PP PNBPN tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa diaturnya ketentuan mengenai penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara

Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197.22 km²) dan luas perairan kurang lebih 39.82 km² dan secara administratif dibatasi oleh : Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Selatan : Sebelah Selatan : Teluk Lampung : Sebelah Barat : Kabupaten Pesawaran : Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat dengan Bapak H. Muhyidin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat mengatakan bahwa sejak dibentuknya Kementerian Agama tanggal 03 Januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah

yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.

Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 98 (sembilan puluh delapan) Kelurahan, 246 (dua ratus empat puluh enam) Lingkungan, serta 2.672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) Rukun Tetangga (RT). Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 881.801 jiwa (delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu) yang terdiri dari 445.959 (empat ratus ribu empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) jiwa penduduk laki-laki dan 435.842 (empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua) jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk kota paling banyak berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang berjumlah 92.156 (Sembilan puluh ribu seratus lima puluh enam) jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah 41.225 (empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk kota mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 2.76% pertahunnya.

Kecamatan Tanjungkarang Pusat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Bambu Kuning (Kampung Kaliawi). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DATI II Tanjungkarang-Teluk Betung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat berdiri sendiri dengan pusat pemerintahannya di Tanjungkarang yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu Tanjungkarang, Kaliawi, Pasir Gintung, Gunung Sari, Penengahan, Pelita, Gotong Royong, Enggal, Kelapa Tiga, dan Durian Payung.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Lampung Nomor : 6/185.BIII/NK/1998 tentang Pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung maka Kecamatan Tanjungkarang Pusat bertambah 1 (satu) kelurahan, yaitu Kelurahan Palapa yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Durian Payung dan sampai saat ini Kelurahan Palapa dijadikan sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Secara geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada 5° 24' 25'' sampai 5° 24' 27'' LS dan 105° 15' 75'' BT, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Timur.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkarang Barat.

Kecamatan Tanjungkarang Pusat terletak pada kemiringan lereng 0-20% dan ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari dataran dan daerah perbukitan, yaitu Kelurahan

Durian Payung dan Kelurahan Gunung Sari. Dataran Kecamatan Tanjungkarang Pusat juga dialiri oleh sungai Way Awi, Way Simpung, dan Way Penengahan yang mengalir di Kelurahan Kepala Tiga, Kaliawi, Pasir Gintung, dan Kelurahan Penengahan.

Kecamatan Tanjungkarang Pusat merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk. Dari hasil pendataan akhir tahun 2008, jumlah penduduk di kecamatan Tanjungkarang Pusat tercatat sebanyak 72.386 jiwa dan tahun 2010 jumlah penduduk meningkat menjadi 81.984 jiwa. dengan kepadatan rata-rata 111 jiwa/Ha. Sama dengan daerah lain, penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat menganut beragam agama.

**Agama dan Jumlah Penganutnya
di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016**

No	Satuan Organisasi	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama						Keterangan
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Durian Payung	7.920	7.409	266	75	12	158	9	
2	Gotong Royong	3.952	3.534	222	113	57	26	-	
3	Kaliawi	2.917	2.882	9	4	15	7	-	
4	Kaliawi Persada	3.326	3.248	48	18	0	12	-	
5	Kelapa Tiga	7.041	6.930	11	27	0	73	-	
6	Palapa	2.019	1.854	84	80	0	91	-	
7	Pasir Gintung	5.341	4.936	114	140	35	116	-	
8	Enggal	4.618	4.352	112	97	15	42	-	
9	Pelita	3.202	2.942	79	90	10	81	-	
10	Tanjungkarang	3.617	2.821	114	214	0	468	-	
11	Gunung Sari	2.316	2.282	15	10	0	9	-	
	Jumlah	46.359	43.190	1.074	868	144	1.083	-	46.359

Sumber : KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat 2016.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat memiliki keyakinan yang bervariasi, namun keyakinan yang dianut oleh mayoritas penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah agama Islam dengan jumlah 43.190 jiwa atau sebesar 87,15%, dan pemeluk agama minoritas adalah agama Hindu dengan jumlah penganut

sebanyak 144 jiwa atau 1.6%. Perbedaan keyakinan penduduk dalam memeluk agama di Kecamatan Tanjungkarang Pusat tidak mengakibatkan perselisihan antara penganut agama. Adanya sifat saling menghargai dan selalu hidup berdampingan antara penganut agama sehingga menjadikan hubungan masyarakat yang rukun dan tentram.

**Jumlah Rumah Ibadah
di Kelurahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2016**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	46
2	Gereja	2
3	Kelenteng/Vihara	3
Jumlah		51

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jumlah masjid sebagai tempat ibadah pemeluk agama Islam sangat dominan, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang menganut agama Islam adalah penganut yang terbesar di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, yaitu sebesar 87,1% dari total penduduk. Keberadaan tempat ibadah agama yang saling berdampingan tidak mengakibatkan perselisihan antar pemeluk umat beragama yang ada di Kecamatan Tanjungkarang Pusat karena tingginya rasa toleransi beragama pada masing-masing penduduk.

Berdasarkan uraian singkat di atas, KUA Tanjungkarang Pusat memiliki visi dan misi dimana pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat telah menetapkan visi untuk 5 (lima) tahun kedepan : ”Terwujudnya Masyarakat

Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang Taat Beragama, Rukun, Ikhlas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.”

Visi ini merupakan *grand desain* KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat untuk 1 (satu) tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu 2017-2018. Penetapan tahun 2010-2014 merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2017-2018 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014. Selain itu dimaksudkan juga sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut 5 (lima) tahun kedepan bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Perumusan visi tersebut telah disesuaikan dengan visi KUA Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, karena secara geografis KUA Tanjungkarang Pusat berada di wilayah Kota Bandar Lampung maka dalam perumusan visi misi KUA tersebut juga disesuaikan dengan visi misi Kota Bandar Lampung yaitu “Kota Tapis Berseri.”

Bapak H. Muhyidin menjelaskan bahwa penjelasan Visi KUA Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung meliputi sebagai berikut :

1. Taat Beragama :
Suatu mainstream sikap masyarakat yang dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan dan kebijakan yang terdapat dalam tatanan masyarakat tersebut didasarkan atas aturan-aturan agamanya.
2. Rukun
Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub (akur), baik hubungan internal pemeluk agama maupun antar pemeluk agama.
3. Ikhlas

Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub, baik hubungan internal pemeluk agama maupun antar pemeluk agama.

4. Mandiri

Keadaan atau sikap masyarakat yang independen dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan kehidupannya.

5. Sejahtera lahir batin

Keadaan masyarakat yang telah tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya sehingga tidak bergantung pada bantuan orang/masyarakat lain.¹

Lebih lanjut Bapak H. Muhyidin mengatakan bahwa dengan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka diharapkan masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera lahir dan batin. Hal tersebut di atas, hanya mungkin bisa terwujud jika didasari dengan pembentukan keluarga sakinah terlebih dahulu.

Faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah adalah pondasi awal pernikahan harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan agama dan negara, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat.

Hal tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila KUA kecamatan selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan Nikah dan Rujuk bagi orang Islam mempunyai manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan

¹ Hasil Wawancara penelitian dengan Kepala KUA Tanjungkarang Pusat pada Bulan Agustus 2017.

pelayanan yang berasaskan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel, disiplin, amanah, transparan, sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan pemanfaatan informatika dan teknologi yang handal dan optimal. Oleh karena itu, terlaksananya manajemen yang baik berbasis teknologi informasi menjadi program unggulan guna mewujudkan masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang Taat Beragama, Rukun, Ikhlas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari KUA Tanjungkarang Pusat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan pada Masyarakat
Misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa faktor yang mendapat perhatian serius yaitu membangun kembali sistem organisasi dan manajemen yang baik, pengadaan sarana dan prasarana kantor yang representatif, peningkatan sumber daya manusia, kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi SIWAK, SIMAS, dan SIMPEG yang kesemuanya merupakan aplikasi terpadu pada SIMBI.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi di era sekarang dirasakan semakin mendesak termasuk dalam hal pelayanan publik. Sebagai sebuah institusi layanan publik, KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat berusaha menjawab tantangan itu dengan menyediakan fasilitas teknologi berupa internet (*website*), *blog*, *facebook*, *email* maupun sarana telekomunikasi telepon dan *faximile*. Dengan misi ini diharapkan masyarakat luas

dimanapun dan kapanpun dengan mudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan KUA, juga mengetahui dan mengakses berbagai informasi tentang KUA, ilmu agama atau umum maupun potensi keagamaan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan cepat dan akurat. Khusus dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk, dengan misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan nikah dan rujuk semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa faktor yang mendapat perhatian serius adalah optimalisasi program Aplikasi SIMKAH dan kemudahan prosedur pelayanan sesuai standar. Standar pelayanan juga telah dipublikasikan, baik dalam rapat mingguan tingkat Kelurahan dan kecamatan maupun rapat-rapat atau pertemuan lainnya sehingga masyarakat diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis layanan yang diselenggarakan KUA beserta biaya dan waktu pelayanan yang dibutuhkan. Dalam bidang ini pula, sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah, maka KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat telah menggunakan aplikasi SIMKAH dan di *upload* ke situs Bimas Islam sehingga data tentang nikah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Data nikah, termasuk didalamnya tentang pengumuman kehendak nikah yang ada di KUA Tanjungkarang Pusat juga dapat diakses melalui *website bimasislam.kemenag.go.id* pada kolom layanan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban KUA terhadap publik sekaligus upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses data KUA Tanjungkarang Pusat.

3. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
Misi ketiga ini adalah upaya agar kegiatan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah terus gencar dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Segenap pegawai dan seluruh pihak yang terkait dengan KUA menyadari betul bahwa untuk mewujudkan visi KUA, maka kegiatan pembinaan keluarga sakinah mutlak dilakukan. Kegiatan pembinaan keluarga sakinah ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya: Mengintensifkan kursus calon pengantin, optimalisasi BP4, Kerjasama dengan Penyuluh Agama Honorer (PAH) dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga sakinah pada setiap majlis ta'lim dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mengadakan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan pasca menikah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf
Misi keempat ini berusaha menggali dan memaksimalkan potensi tersebut dengan membangkitkan kesadaran umat terhadap tugas dan kewajibannya, baik secara individu maupun sosial. Dengan zakat, wakaf maupun haji ini diharapkan pula tumbuh kepedulian sosial bersama, terutama dari para *aghiya'* terhadap sesama umat. Cara yang ditempuh antara lain melalui pemberdayaan lembaga BAZ, pendampingan sertifikasi wakaf dan peningkatan kualitas bimbingan manasik haji.

5. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan
Beberapa lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat, seperti BAZ (UPZ), IPHI, LP2A, DMI, MUI, BP4, LPTQ, Fosipa dan FKUB, semuanya mempunyai andil yang signifikan dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang taat beragama, rukun, ikhlas, mandiri, sejahtera lahir dan batin. KUA dalam hal ini berupaya memfasilitasi dengan menggerakkan roda organisasi dan kepengurusannya agar peran serta fungsi lembaga-lembaga dakwah tersebut dapat semakin baik sehingga kiprahnya di masyarakat bisa semakin dirasakan.
6. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral
Misi terakhir ini adalah upaya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan umat disegala lini, sehingga KUA dapat melakukan sinergi dan kerja sama dengan komponen yang ada dalam masyarakat, seperti instansi terkait (baik pemerintah maupun swasta), organisasi sosial agama, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim dan tempat-tempat ibadah. Disadari bahwa semua komponen umat di atas memiliki potensi besar sebagai mitra KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat untuk bersama-sama membangun keluarga sakinah yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang taat beragama, rukun, ikhlas, mandiri dan sejahtera lahir batin.²

Lebih lanjut menurut Bapak Bapak H. Muhyidin menjelaskan bahwa adapun Moto KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung adalah sebagai berikut : Untuk melaksanakan misi KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung sebagaimana tersebut diatas, KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung juga telah menetapkan motto pelayanan yaitu : "Melayani dengan ikhlas, amanah dan profesional" (*serve with a sincere trustful and profesional*)”

Disamping berpegang pada motto “*Iklas Beramal*” yang merupakan moto Kementerian Agama, dalam melaksanakan tugas, seluruh Pegawai KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat bertekad untuk bekerja dengan ikhlas, profesional dan amanah. Profesional berarti bekerja dengan didasari komitmen dan kemampuan yang memadai, yakni melaksanakan tugas sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki, sedangkan amanah berarti jujur dan dapat dipercaya. Amanah berkaitan dengan sikap mental, moral dan karakter.

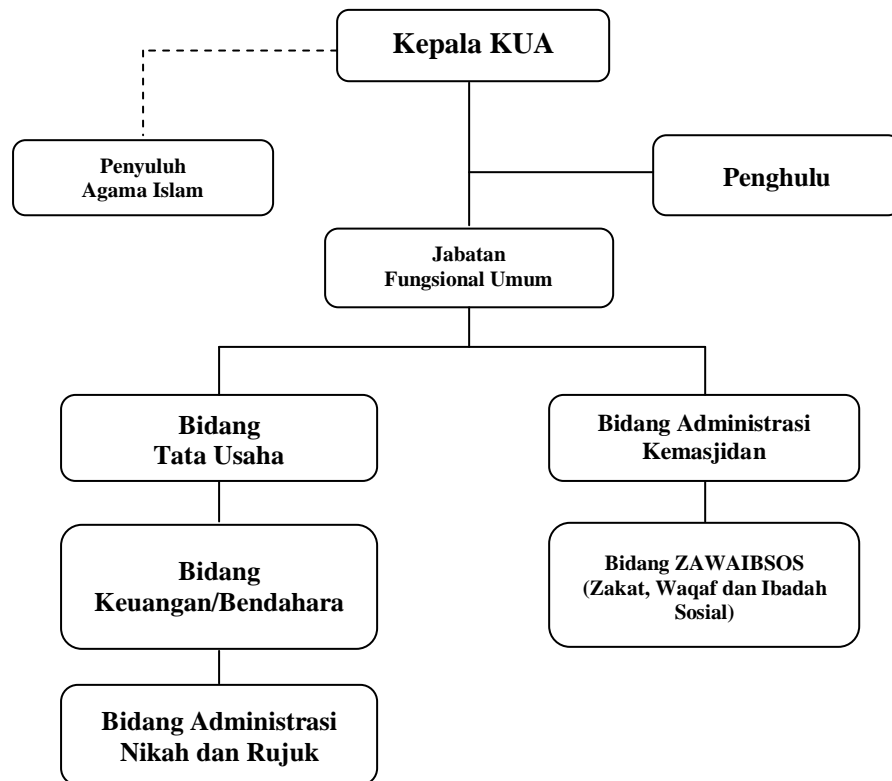
Seorang yang profesional akan selalu memberikan yang terbaik kepada institusi dan masyarakat yang dilayani, sedangkan seorang yang amanah menyadari bahwa Allah pasti melihat setiap pekerjaan, perbuatan dan bahkan segala yang terlintas di hati manusia. Dengan moto ini diharapkan dapat tercipta birokrasi yang bersih serta belia dengan jujur, teliti dan ikhlas.

Moto yang telah ditetapkan KUA Tanjungkarang Pusat diharapkan dapat menghilangkan stigma tersebut, dengan Moto “Melayani dengan ikhlas, amanah dan Profesional”, KUA Tanjungkarang Pusat berkeinginan agar segala pelayanan yang diberikan dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat sekaligus menjadi amal ibadah yang pahalanya dapat diraih di akhirat nanti. Dengan moto ini pula diharapkan KUA terbebas dari lingkaran gratifikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap KUA semakin baik dan sukses.³

Bapak H. Muhyidin selaku kepala KUA Tanjungkarang Pusat mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Adapun poin penting dalam Peraturan Menteri Agama tersebut adalah status kepala KUA dari Eselon IVb menjadi Penghulu dengan tugas tambahan Kepala KUA Kecamatan dan Penyuluh Agama Islam yang semula bukan bagian dari KUA menjadi bagian dari KUA Kecamatan. Adapun susunan organisasi KUA terdiri dari :

² Hasil Penelitian pada KUA Tanjungkarang Pusat pada Bulan Agustus Tahun 2017.

³ Hasil Penelitian pada KUA Tanjungkarang Pusat pada Bulan Agustus Tahun 2017.



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2016.

Bapak H. Muhyidin mengatakan bahwa adapun gambaran umum tugas pokok KUA secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴

1. Kepala KUA :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas KUA menetapkan/merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan KUA.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KUA.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.

⁴ Hasil Penelitian pada KUA Tanjungkarang Pusat pada Bulan Agustus Tahun 2017.

- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
 - k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
 - l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
 - m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
2. Penghulu dan Penyuluh :
- a. Penghulu :
 - 1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluhan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk.
 - 2) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk, pembinaan hukum *munakahat* dan *ahwal syahshiyah*, pembinaan catin dan keluarga sakinah.
 - b. Penyuluh Agama Islam :
 - 1) sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.
 - 2) Melaksanakan fungsi informatif dan edukatif, dimana Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebai-baiknya sesuai ajaran agama.
 - 3) Melaksanakan fungsi konsultatif, dimana Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
 - 4) Melaksanakan fungsi advokatif, dimana Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak".
3. Jabatan Fungsional Umum :
- a. Bidang Tata Usaha :
 - 1) Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
 - 3) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
 - 4) Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.
 - b. Bidang Keuangan/Bendahara :
 - 1) Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.

- 2) Menertibkan arsip keuangan.
 - 3) Menyusun DUK/DIK.
 - 4) Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos atau Giro.
 - 5) Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM. P2A, dan BP4.
- c. Bidang Administrasi Nikah dan Rujuk :
- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
 - 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah
 - 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 - 5) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
 - 6) Melaksanakan penulisan akta nikah.
 - 7) Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
 - 8) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- d. Bidang Administrasi Kemasjidan :
- 1) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar.
 - 2) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
 - 3) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
 - 4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran Agama.
- e. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Waqaf dan Ibadah Sosial) :
- 1) Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - 2) Membukukan/ mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
 - 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa membahas mengenai gambaran umum KUA sebagai suatu bagian dari unit organisasi, maka akan terkait erat dengan manajemen, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan kegiatan kelompok dan berdasarkan pada tujuan yang jelas, yang harus dicapai dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada. KUA merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha

bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. termasuk KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya.

B. Pelaksanaan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung dengan Bapak H. Muhyidin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung mengatakan bahwa KUA merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. KUA merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama.

Bapak H. Muhyidin menjelaskan bahwa membahas mengenai KUA sebagai suatu bagian dari unit organisasi, maka akan terkait erat dengan manajemen, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan kegiatan kelompok dan berdasarkan pada tujuan yang jelas, yang harus dicapai dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada. Dengan demikian, kegiatan manajemen yang ada pada KUA Kecamatan harus pula menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen yang disingkat POAC, yaitu :

1. Adanya *Planning*, yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
2. Adanya *Organizing*, yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana dan prasarana, tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
3. Adanya *Actuating*, yaitu proses berjalannya sebuah tanggungjawab dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
4. Adanya *Controlling*, yaitu proses pengamatan dan pengawasan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan/kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Lebih lanjut Bapak H. Muhyidin menjelaskan bahwa KUA merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. UUD 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama, termasuk KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang lazim disingkat menjadi

PPN. Untuk di luar Jawa Madura dibantu oleh tokoh-tokoh agama di desa-desa yang dianggap mampu dan cakap, dan mereka itu bukan pegawai Negeri, dianggap menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk hal ini diatur dengan surat Penetapan Menteri Agama Nomor 14 tahun 1955 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang disingkat menjadi P3NTR. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.

Lebih lanjut Bapak H. Muhyidin menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan di wilayah KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan Pembinaan Catin :

Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yaitu meneliti dan memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu, untuk mengecek kelengkapan Catin (Calon Pengantin). Apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada persyaratan yang kurang, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap catin dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika Catin dan Wali Nikah berada diluar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh

PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggalnya, setelah pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut Hukum Munakahat maupun hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan), maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan Surat Penolakan beserta alasannya. Setelah dinyatakan telah memenuhi syarat maka calon Catin dan Wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk KUA Tanjungkarang Pusat biaya yang dikenakan pada Catin sebesar Rp.600.000,-sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, untuk pembayarannya bisa disetorkan langsung ke KUA atau bisa melalui pihak Bank, hal ini berlaku untuk akad yang dilakukan diluar kantor KUA atau dirumah pihak Catin sedangkan apabila akadnya dilakukan dikantor KUA dan pada jam kerja maka dikenakan biaya sebesar Rp.0,.

Namun pada kenyataannya prosedural yang terjadi sangatlah kompleks, jadi pengantin yang ingin menikah mendaftar dahulu ke RT-RW-P2N-KUA, hal ini membuat biaya yang dikeluarkan akibat birokrasi ini sangatlah membengkak bahkan Kepala KUA mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp.400.000-Rp.500.000,- (empat ratus ribu rupiah-lima ratus ribu rupiah), ini kemudian yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus pernikahan mereka ke Kantor KUA.

Bapak H. Muhyidin menjelaskan bahwa adapun pembinaan yang dilakukan oleh KUA kepada para calon pengantin, yaitu:

- a. Setelah Pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan Wali Nikah, mengikuti pembinaan dan Kursus Calon Pengantin.
 - b. Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qobul.
 - c. Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Adapun prosedur atau tata cara proses Pengurusan dan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA sebagai berikut :

a. Dari rumah, mempersiapkan:

- 1) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
- 2) Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW.
- 3) Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 (lembar) lembar.

b. Ke Kantor Lurah/Desa, mendapatkan:

- 1) Surat Model N1 (Keterangan untuk nikah).
- 2) Surat Model N2 (Keterangan asal usul).
- 3) Surat Model N3 (Persetujuan kedua calon mempelai).
- 4) Surat Model N4 (Keterangan tentang orang tua).

c. Kemudian ke KUA setempat, untuk mendapatkan/mengikuti :

- 1) Surat Model N7 (Pendaftaran nikah).
- 2) Penetapan hari/tanggal, waktu dan tempat akad nikah.

- 3) Pemeriksaan dan bimbingan pernikahan.
- 4) Pelaksanaan akad nikah (di KUA atau di kediaman salah satu calon).
- 5) Memperoleh Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah.

d. Catatan Tambahan:

- 1) Menyertakan izin tertulis dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Model N5) atau izin dari pengadilan apabila orang tua/wali tersebut di atas tidak ada.
- 2) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 3) Surat izin dari atasan/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- 4) Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).
- 5) Akta cerai bagi calon mempelai duda/janda cerai hidup.
- 6) Surat Keterangan Kematian Suami/Istri bagi calon mempelai cerai mati (Model N6).
- 7) Izin menikah dari atasan bagi PNS yang hendak melakukan pernikahan yang kedua.
- 8) Surat Rekomendasi Nikah (dari KUA) bagi calon perempuan yang berasal dari luar Kecamatan.

Berdasarkan wawancara selama penelitian pada KUA Tanjungkarang Pusat, maka diperoleh data mengenai perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA dan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA Tanjungkarang Pusat, sebagai berikut :

NO	SATUAN ORGANISASI KELURAHAN	PERKAWINAN DI KUA	PERKAWINAN DI LUAR KUA	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
1	DURIAN PAYUNG	-	62	Rp. 37.200.000,-
2	GOTONG ROYONG	-	29	Rp. 17.400.000,-
3	KALIAWI	-	94	Rp. 56.400.000,-
4	KALIAWI PERSADA	-	38	Rp. 22.800.000,-
5	KELAPA TIGA	-	52	Rp. 31.200.000,-
6	PALAPA	-	23	Rp. 13.800.000,-
7	PASIR GINTUNG	-	56	Rp. 33.600.000,-
8	ENGGAL	-	36	Rp. 21.600.000,-
9	PELITA	-	24	Rp. 14.400.000,-
10	TANJUNGKARANG	-	11	Rp. 6.600.000,-
11	GUNUNG SARI	-	14	Rp. 8.400.000,-
12	BALAI NIKAH	22	-	-
	JUMLAH	22	439	Rp.263.400.000,-
	TOTAL	461		Rp.263.400.000,-

Sumber : KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA dan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA Tanjungkarang Pusat periode tahun 2016 sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) pelaksanaan perkawinan, dimana pemasukan negara dari PNBP yang berlaku di Kementerian Agama sangat besar.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada KUA Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung dengan Bapak H. Muhyidin selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat mengatakan bahwa KUA Tanjungkarang Pusat memahami tentang PP PNBPN, karena menyangkut tentang peraturan biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA itu sendiri. Hal itu semakin jelas setelah KUA Tanjungkarang Pusat beberapa kali mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi tentang PP PNBPN baik yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, juga selalu mengikuti informasi dari Dirjend Bimas Islam melalui website yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian bahwa dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa biaya pelayanan nikah di KUA pada hari dan jam dinas diberlakukan tarif Rp.0,- (nol rupiah) sedangkan di luar KUA atau di luar hari dan jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai PNBPN, dimana dalam pembayarannya dilakukan oleh calon pengantin sendiri di Bank BRI unit Kecamatan, slip bukti pembayaran itu selanjutnya di bawa ke KUA bersama persyaratan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian bahwa pelaksanaan Penetapan Biaya Nikah di KUA Pasca Berlakunya PP PNBP tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama membawa banyak fungsi dan manfaat bagi KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat, diantaranya adalah :

1. Fungsi Perlindungan Hukum

Para pelaksana teknis di KUA, baik kepala, penghulu maupun pelaksana KUA merasa aman dari tuduhan gratifikasi atau pungli yang selama ini menderanya. Lahirnya Peraturan Pemerintah itu benar-benar menjadi payung hukum terhadap penarikan biaya dari masyarakat untuk pelayanan nikah diluar kantor KUA.

2. Fungsi Pembangun Citra Positif KUA

Penerapan PP PNBP dengan disiplin dan benar, akan meningkatkan citra positif KUA dari berbagai image miring. Sebab, apapun yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah itu telah mempunyai kekuatan hukum yang maksimal. Sehingga biaya transportasi dan jasa profesi yang selama ini dinilai ilegal, kini telah menjadi legal. Menjadi pungutan resmi dalam bentuk PNBP dan bukan lagi dianggap gratifikasi atau pungutan liar seperti yang dituduhkan selama ini.

3. Fungsi Keadilan

Aspek keadilan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan PP PNBP. Pernikahan atau diluar jam dinas ditentukan tarifnya untuk menopang kebutuhan riil pelayanan berupa transportasi dan jasa profesi. Sedangkan akad nikah di kantor pada jam dinas, karena

tidak menimbulkan biaya dalam pelayanannya, maka tidak dikenakan biaya alias gratis. Hal demikian merupakan wujud keadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang dilayani ataupun para pelaksana di KUA sebagai petugas pelayan.

4. Fungsi Sinkronisasi

Yang dimaksud adalah sinkronisasi diantaranya pelayanan akta perkawinan harus gratis tanpa biaya dalam PP PNBPN menetapkan bahwa biaya pencatatan nikah ditiadakan atau gratis. Sedangkan komponen biaya dalam nikah diluar KUA bukan untuk biaya pencatatan, tapi biaya transportasi dan jasa profesi.

Berdasarkan hasil penelitian pada KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat, langkah KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat setelah menerima perintah untuk melaksanakan PP PNBPN itu segera mengadakan koordinasi untuk membahas rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan tersebut . Selain itu melakukan tindakan-tindakan yang terprogram hasil dari sosialisasi yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak, maka diupayakan melalui kegiatan sosialisasi secara maksimal. Kepala KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat telah mengambil kebijakan sosialisasi ini melalui berbagai jalan, yang meliputi :

- a. Sosialisasi kepada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjungkarang Pusat secara berkala yakni setiap bulan.

- b. Sosialisasi melalui Papan Informasi di KUA.
- c. Sosialisasi melalui Penyuluh Agama PNS maupun Non PNS.
- d. Sosialisasi melalui Acara Suscatin, dimana membayar biaya nikah awal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Suscatin didaftarkan.
- e. Sosialisasi melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan (Muspika).
- f. Sosialisasi melalui ceramah-ceramah keagamaan di kelurahan.

2. Implementasi Peraturan dengan serius

Implementasi PP PNBPN dilakukan dengan melalui berbagai cara, yang meliputi :

- a. Pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh penghulu dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA.
- b. Pembayaran PNBPN melalui BRI langsung disetor oleh catin atau walinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi baik oleh penghulu maupun unsur pelaksana di KUA.
- c. Menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA.
- d. Meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungutan liar.

3. Membangun integritas

Integritas para petugas KUA sangat perlu diupayakan terus menerus. Sebab hal ini merupakan salah satu kunci agar imlementasi berjalan maksimal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam membangun integritas tersebut adalah meliputi :

- a. Himbauan dan ajakan kepada petugas KUA untuk penolakan atau tidak menerima gratifikasi.
- b. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas KUA.
- c. Staf meeting secara berkala untuk membangun integritas petugas di KUA untuk secara sungguh-sungguh tidak melakukan pungutan liar dengan alasan apapun.

4. Supervisi

Supervisi atau pengawasan merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan. Oleh karenanya, Kepala KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat tak henti-hentinya melakukan supervisi langsung kepada Penghulu, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan. Supervisi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum pengaduan dalam bentuk kotak saran di KUA.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat dijelaskan bahwa di KUA disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan masyarakat. Hal demikian akan memudahkan bagi proses pengawasan dan sekaligus dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan

KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kotak saran dibuka secara berkala setiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat bahwa salah satu bagian dari kegiatan kepenghuluan di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan nikah. Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi leading sektor KUA. Pelayanan nikah di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada peraturan perundangan yang berlaku, dalam bentuk dan prosedur sebagai berikut :

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Sebagaimana lazimnya, pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan berkas Model N7 (pemberitahuan kehendak Nikah) yang dilampiri dengan Model N1, N2, N3, N4, N5 (jika usia catin kurang 21 (dua puluh satu) tahun), N6 (jika duda/janda tinggal mati). Berkas dilampiri foto copy KTP, KK, Akta Kelahiran atau Ijazah, Akta Cerai (jika duda/janda cerai-talak), Rekomendasi KUA asal (jika catin dari luar kecamatan), Ijin Atasan (jika catin anggota TNI/POLRI), Dispensasi Pengadilan Agama (jika catin berusia di bawah 16 (enam belas) untuk putri dan 19 (sembilan belas) untuk putra), ijin poligami dari PA (jika pernikahan poligami) dan Dispensasi Camat (jika pelaksanaan nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran).

Berkas tersebut untuk kedua mempelai diserahkan kepada petugas pendaftaran. Setelah diverifikasi dalam lembar lain, kemudian diberitahukan kekurangan yang harus segera dilengkapi. Selanjutnya, jika

pernikahan diluar kantor KUA, maka diberikan slip setoran PNPB dan catin menyetorkan dana nikah di luar kantor KUA melalui Bank BRI. Setelah setor, slip Bank diserahkan kembali ke KUA dan oleh petugas pendaftaran diberi undangan Kursus pra Nikah sesuai jadwal terdekat sebelum pelaksanaan akad nikah.

2. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Sesuai undangan saat pendaftaran, catin hadir pada hari yang telah terjadwal. KUA telah menentukan jadwal pada setiap bulannya 2 (dua) kali penyelenggaraan kursus, awal bulan dan pertengahan bulan. Kursus dibuka pada jam 08.00 wib dan selesai pada jam 12.00 wib. Pemateri atau narasumber terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama dan jika memungkinkan mengundang petugas dari puskesmas atau PLKB. *Scheduling* kursus telah berjalan sistematis, hingga semua stakeholder KUA sudah memahaminya hingga pelaksanaannya sudah sangat mudah dan lancar.

3. Pemeriksaan Nikah

Ada beberapa cara dalam tahap pemeriksaan catin. Pertama, dilakukan saat pendaftaran, jika catin sudah siap hadir lengkap berdua ditambah dengan walinya. *Interview* dilakukan sesaat setelah pendaftaran dinyatakan lengkap. Kedua, catin dan wali hadir saat suscatin dan melakukan *interview* sesaat sebelum kursus dimulai. *Ketiga*, hari lain yang disepakati sesuai longgaran waktu catin dan walinya. Pelaksanaan interview dilakukan oleh Kepala KUA atau penghulu sesuai dengan ketentuan yang ada dan selanjutnya menandatangani berkas model NB.

4. Pengumuman Nikah

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, setelah pendaftaran nikah dinilai lengkap, maka diterbitkan lembar pengumuman (Model NC) yang dipasang di papan pengumuman KUA. Disamping itu, ditampilkan secara sistemik melalui facebook yang terintegrasi dengan SIMKAH online.

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Sesuai permohonan *shohibul hajat*, akad nikah bisa dilaksanakan di KUA atau di tempat lainnya. Pada hari, jam dan tempat yang ditentukan, maka Kepala KUA atau penghulu akan menghadirinya. Kelaziman yang terjadi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, wali menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada penghulu atau Kepala KUA.

Sehingga secara umum, peran penghulu hanya sebagai petugas pencatatan saja tidak memimpin seluruh prosesi akad nikah. Usai pelaksanaan akad, dilakukan penandatanganan akta nikah oleh mempelai berdua, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, Buku nikah diserahkan langsung oleh penghulu kepada pengantin berdua pada saat akhir prosesi akad nikah. Prosedur tetap demikian juga sudah berjalan secara sistematis dan lancar.

6. Pencatatan Nikah (Penerbitan Akta Nikah dan Kutipannya)

Pencatatan dilakukan dengan penerbitan akta nikah (Model N) yang dibuat rangkap dua. Setelah ditandatangani pihak-pihak secara lengkap pada saat akad nikah, kemudian Kepala KUA selaku PPN membubuhkan tanda tangannya dan resmi Akta Nikah dinyatakan terbit dan disimpan di KUA sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu,

secara otomatis tersimpan pula pada aplikasi SIMKAH dan secara bertahap dikirim secara online ke server Kementerian Agama.

7. Penyerahan Kutipan Akta Nikah (Model NA)

Buku nikah atau Kutipan akta Nikah diserahkan oleh penghulu sesaat setelah usai prosesi akad nikah. Hal ini dapat dilakukan karena semua prosedur telah dilaksanakan dengan benar dan lengkap. Sehingga menjelang pelaksanaan akad, proses pencetakan Akta Nikah dan Buku nikah dapat segera dilakukan. Begitu ditandatangani oleh kedua mempelai, wali dan 2 (dua) saksi, maka Kutipannya dapat langsung diberikan. Cara demikian telah dapat dipraktikkan di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan penetapan biaya nikah di KUA pasca berlakunya PP PNBPN tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi sosialisasi agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak secara maksimal, implementasi peraturan dengan serius melalui berbagai cara yaitu pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh penghulu dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA, Pembayaran PNBPN melalui BRI, menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA dan meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungutan liar. Membangun integritas, hal ini merupakan salah satu kunci agar

implementasi berjalan maksimal dan Supervisi atau pengawasan merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan secara langsung kepada penghulu, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan serta di KUA disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan masyarakat. Hal demikian akan memudahkan bagi proses pengawasan dan sekaligus dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

B. Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung

Masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan pencatatan pernikahan pada sekitar bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dari hasil wawancara, pengamatan masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat serta penelitian data yang ada di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat diperoleh beberapa hal yang dapat digambarkan sebagai dampak dari pelaksanaan PP PNBPN bagi masyarakat Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Analisis Legalitas

Lahirnya PP PNBPN, muncul dari sikap “Ikhlās Beramal” sebagai paradigma berfikir Kementerian Agama agar dijadikan pertimbangan legal yuridis, terutama mengenai aspek keuangan. Antisipasi jangka panjang yang jeli dan strategis dalam penyusunan materi-materi hukum dan peraturan, mestinya harus dilakukan dengan seksama, dan tidak reaktif seperti dewasa ini terjadi.

2. Analisis Efektivitas dan Kepuasan Publik

Adanya PP PNBP yang telah resmi diberlakukan, maka diharapkan adanya integritas dalam bentuk disiplin kerja petugas teknis di KUA sehingga mendukung program pemerintah dalam gerakan anti gratifikasi dan pungutan liar. Peraturan tentang biaya pelayanan di KUA yang lengkap komprehensif dan meng-cover seluruh kegiatan KUA, menjadi hal yang sangat urgent.

3. Analisis terhadap dampak dari pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bagi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian di KUA Tanjungkarang Pusat, dampak dari pelaksanaan atas PP PNBP dapat dilihat dari data statistik masyarakat yang melangsungkan pernikahan di KUA hanya 7 (tujuh) catin, setelah adanya PP PNBP periode 2016 meningkat menjadi 22 (dua puluh dua) catin yang melangsungkan pernikahan di KUA. Berdasarkan data tersebut, masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung secara umum menanggapi secara mendalam tentang peraturan dan tata perundang-undangan yang menyangkut biaya pernikahan. Dimana sosialisasi PP PNBP yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat direspon baik oleh masyarakat di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa dampak dari pelaksanaan PP PNBP bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat adalah sebagai berikut :

1. Biaya Nikah

Sebagian masyarakat menyatakan kepuasannya setelah biaya pernikahan diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan baik di KUA maupun diluar KUA Tanjungkarang Pusat selama periode tahun 2016 dapat dianalisis bahwa mengenai biaya nikah masyarakat diberikan pilihan sebagaimana diatur dalam PP PNBK Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA, dimana hal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Adanya kepastian tarif tentang biaya nikah yang ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan ketidak raguan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat bahwa masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan Januari - Desember 2016 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat relatif terjangkau. Adanya ketentuan PP PNBK yang substansinya adalah merubah biaya pencatatan nikah menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila dilaksanakan di luar KUA dan Rp.0,- (nol rupiah). Lurah sangat penting peranannya dalam menentukan validitasi data Catin.

2. Tempat Pelaksanaan Nikah

Pernikahan merupakan peristiwa hukum, artinya terpenuhinya persyaratan administrasi yang telah diatur dengan undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan itu sendiri. Peristiwa hukum maksudnya pernikahan itu dilihat dari sisi aturan yang ada baik persyaratan, pendaftaran, pemeriksaan, pelaksanaan maupun pencatatan pernikahan.

Ketentuan di PP PNBPN menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di KUA dan diluar KUA. Di luar KUA maksudnya dapat dilaksanakan dirumah, di gedung, masjid ataupun tempat lain yang dianggap paling baik. Masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang memiliki ciri relegius dan cenderung memandang bahwa pernikahan merupakan peristiwa sakral dan suci maka harus dilaksanakan dihadapan orang-orang yang sangat dihormati seperti kyai atau alim ulama sehingga tempatnya cenderung diluar KUA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa dampak dari pelaksanaan PP PNBPN bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat meliputi Biaya Nikah yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA. masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan Januari - Desember 2016 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat relatif

terjangkau, karena masyarakat merasakan saat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah ternyata tidak cukup Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masih ada tambahan biaya serta Tempat Pelaksanaan Nikah, PP PNBPN menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di KUA dan diluar KUA. Di luar KUA maksudnya dapat dilaksanakan dirumah, di gedung, masjid ataupun tempat lain yang dianggap paling baik.

Pemilihan tempat pernikahan lebih kepada adat isitiadat yang biasa dipakai disuatu daerah. Masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat cenderung memandang bahwa pernikahan merupakan peristiwa sakral dan suci maka harus dilaksanakan dihadapan orang-orang yang sangat dihormati seperti kyai atau alim ulama sehingga tempatnya cenderung diluar KUA. Meskipun dalam regulasi yang baru itu ditentukan bahwa pernikahan diluar lebih mahal dari pada pelaksanaan di KUA, namun karena budaya yang ada maka pernikahan di kecamatan Tanjungkarang Pusat banyak yang memilih diluar KUA.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi sosialisasi agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak secara maksimal, implementasi peraturan dengan serius melalui berbagai cara yaitu pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya yang mana biaya nikah diatur dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA.

Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh Penghulu dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA, Pembayaran PNPB melalui BRI, menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA dan meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungutan liar. Membangun integritas, hal ini merupakan salah satu kunci agar imlementasi berjalan maksimal dan Supervisi atau pengawasan merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan

sebuah aturan secara langsung kepada penghulu, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan serta di KUA disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan masyarakat. Hal demikian akan memudahkan bagi proses pengawasan dan sekaligus dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

2. Dampak dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat meliputi Biaya Nikah yang diatur secara jelas dengan 2 (dua) pilihan Rp.0,- (nol rupiah) bila dilaksanakan di KUA pada jam dinas, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bila akan melaksanakan di luar KUA. Adanya kepastian tarif tentang biaya nikah yang ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan ketidak raguan terhadap masyarakat. masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bulan Januari - Desember 2016 bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat relatif terjangkau, karena masyarakat merasakan saat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah ternyata tidak cukup Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masih ada tambahan biaya serta Tempat Pelaksanaan Nikah, PP PNBPN menjelaskan bahwa pelaksanaan nikah dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di KUA dan diluar KUA. Di luar KUA maksudnya dapat dilaksanakan dirumah, di gedung, masjid ataupun tempat lain yang dianggap paling baik.

Pemilihan tempat pernikahan lebih kepada budaya dan adat yang biasa dipakai disuatu daerah. Masyarakat Kecamatan Tanjungkarang Pusat cenderung memandang bahwa pernikahan merupakan peristiwa sakral dan suci maka harus dilaksanakan dihadapan orang-orang yang sangat dihormati seperti kyai atau alim ulama sehingga tempatnya cenderung diluar KUA. Meskipun dalam regulasi yang baru itu ditentukan bahwa pernikahan diluar lebih mahal dari pada pelaksanaan di KUA, namun karena budaya yang ada maka pernikahan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat banyak yang memilih diluar KUA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Hendaknya kepada KUA agar dapat mengoptimalkan PNBPN biaya nikah guna menunjang pembangunan nasional sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat melangsungkan pernikahan di KUA guna mendukung kinerja KUA dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat di bidang pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial-Cet. VII*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 1994.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih bahasa A.Hassan), CV. Diponegoro, Bandung, 2011.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, Cet-1*, Departemen AgamaRI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2007.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Kementerian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih*, SYGMA, Jakarta, 2010.

L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala, Jakarta, 1990.

Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Pers, Malang, 2012.

Misbah dan Abdul Rasul, *Membina Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi dan Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Media Komputindo, Jakarta, 2007.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 2010.

Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian-Cet.VII*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Dasar-Dasar Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1994.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Ma'shum Ridho

Npm : 1221010001

PEMBIMBING I : Drs. H. Haryanto H, M.H.

PEMBIMBING II : Drs. H. Jalaluddin, S.H., M.M.

JUDUL SKRIPSI : Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama. (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)

No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	PARAF
1	18-5-2016	Seminar Proposal Pembimbing 1 dan 2	1. Perbaiki Judul 2. Perbaiki Latar Belakang 3. Perbaiki Penulisan	1 2
2	24-5-2016	Bimbingan Bab 1 Pemb. 2	1. Perbaiki alasan obyektif 2. Perbaiki rumusan masalah	2
3	13-4-2017	Acc Bab 1 Pemb 2	Lanjutkan Pembimbing I	2
4	13-4-2017	Acc Bab 1 Pemb 1	Lanjutkan Penulisan Bab II	1
5	28-4-2017	Bimbingan Bab II Pemb. 2	1. Bab II di tambahkan point PP No.19 Th.2015 2. Perbaiki Penulisan 3. Perbaiki Footnote	2
6	16-5-2017	Bimbingan Bab II Pemb. 2	1. Perbaiki urutan teori 2. Tambahkan PP Tentang PNB	2
7	23-5-2017	Acc Bab II Pemb 2	Lanjutkan Pembimbing I	2
8	22-6-2017	Bimbingan Bab II Pemb. 1	1. Perbaiki urutan Teori 2. Tambahkan dasar hukum PNB	1

9	27-7-2017	Acc Bab II Pemb 1	Lanjutkan Penulisan Bab III	1
10	06-9-2017	Bimbingan Bab III Pemb. 2	1. Perbaiki Penulisan dan kata-kata 2. Tambahkan struktur organisasi KUA	2
11	13-9-2017	Bimbingan Bab III Pemb. 2	1. Perbaiki Penulisan dan kata-kata 2. Tambahkan pelaksanaan nikah di KUA	2
12	02-10-2017	Acc Bab III Pemb 2	Lanjutkan Pembimbing I	2
13	04-10-2017	Bimbingan Bab III Pemb. 1	1. Perbaiki gambaran lokasi penelitian 2. Tambahkan data penduduk	1
14	24-10-2017	Acc Bab III Pemb 1	Lanjutkan Penulisan Bab IV-V	1
15	27-10-2017	Bimbingan Bab IV-V Pemb. 2	1. Perbaiki Penulisan dan kata-kata 2. Hapus bagian yang tidak perlu 3. Perbaiki Abstrak	2
16	01-11-2017	Acc Bab IV-V Pemb 2	Lanjutkan Pembimbing I	2
17	01-11-2017	Acc Bab IV-V Pemb 1	Acc untuk di munaqosah	1

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Haryanto H, M.H
NIP. 195612051983031002

Drs. H. Jalaluddin, S.H., M.H.
NIP. 195703051978031001



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN
LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol Hendro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung
35131 Telp. (0721) 704030

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar Pertanyaan untuk KUA Tanjungkarang Pusat :

1. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, bagaimana Pelaksanaan Penetapan Biaya Nikah di KUA Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

2. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, apakah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sudah diterapkan dan disosialisasikan di KUA ?

Jawab :

3. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, apakah ditemukan kendala setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, jika ada kendala, apa sajakah kendala tersebut dan bagaimana solusinya ?

Jawab :

4. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat Bagaimana Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang ingin melaksanakan nikah ?

Jawab :

5. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, Bagaimana Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Bandar Lampung ?

Jawab :



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN
LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol Hendro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung
35131 Telp. (0721) 704030

6. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, apakah di KUA mengadakan pelatihan kursus bagi calon pengantin ?

Jawab :

7. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, pada umumnya masyarakat Kota Bandar Lampung melangsungkan pernikahannya lebih banyak dilakukan di luar jam kerja KUA atau di dalam jam kerja KUA ?

Jawab :

8. Menurut pendapat Bapak selaku Kepala KUA Tanjungkarang Pusat, bagaimana prosedur proses pembayaran pernikahan :

Jawab :

B. Data Narasumber (Masyarakat) :

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil sampel penelitian wawancara terhadap narasumber dari masyarakat yang melakukan pernikahan di wilayah KUA Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung :

1. Narasumber 1

Nama : Anto.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 28 Desember 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Dusun Tanjung Baru TR.003 RW.001 Karang Sari
Jati Agung Lampung Selatan.

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Wali Istri yang beralamat pada Jl. Durian No. 21 Pasir Gintung Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TAnjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

2. Narasumber 2

Nama : Pandi Saputra.

Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 17 April 1993.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Alamat : Jl. H.A. Salim Gg. Darma Bakti 005/I K.Persada
Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Wali Istri yang beralamat pada Jl. Chairil Anwar Gg. Makam No. 05 Durian Payung Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Tidak. Saya meminta bantuan pihak RT.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai, dimana Pihak RT sudah menginfokan PP PNBP tersebut kepada saya.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

3. Narasumber 3

Nama : Irwan Setiawan.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 22 Oktober 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. H.A. Salim LK.I RT.013 Kaliawi Tanjungkarang
Pusat Bandar Lampung.

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :
Jawab :
Saya menikah pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Balai Nikah KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.
- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?
Jawab :
Saya melakukan sendiri pengurusannya dibantu oleh pihak KUA.
- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?
Jawab :
Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.
- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?
Jawab :
Tidak ada biaya lain, dikarenakan saya dan isteri melangsungkan pernikahan di balai nikah pada KUA TAnjungkarang Pusat.
- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?
Jawab :
Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu.

4. Narasumber 4

Nama : Heri Jatmiko.

Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 07 Desember 1978.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Durian No.17 Gedong Air
Tanjungkarang Barat Bandar Lampung.

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Balai Nikah KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TAnjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, dikarenakan saya dan isteri melangsungkan pernikahan di balai nikah pada KUA TAnjungkarang Pusat.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN
LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol Hendro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung
35131 Telp. (0721) 704030

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

5. Narasumber 5

Nama : Topan Setiawan.

Tempat/tanggal lahir : Tanjungkarang, 13 Maret 1985.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. Mangga GG.Sirsak RT.02 PS Gintung
Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Jumát tanggal 10 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Wali Istri yang beralamat pada Jl. Mangga GG.Sirsak RT.03 PS Gintung Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TANjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

6. Narasumber 6

Nama : Siran

Tempat/tanggal lahir : Tanjungkarang, 10 November 1988.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Alamat : Jl. Raden Fatah GG.Ciruas RT.009 Kaliawi
Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Saya yang beralamat pada Jl. Raden Fatah GG.Ciruas RT.009 Kaliawi Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN
LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol Hendro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung
35131 Telp. (0721) 704030

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TANjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

7. Narasumber 7

Nama : Anggi Purnama

Tempat/tanggal lahir : Teluk Betung, 04 September 1994.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Alamat : Jl. Ikan Pariblok No.79 Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Jumát tanggal 17 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Wali/Isteri yang beralamat pada Jl. P.Emir M Noor GG.Bukit RT.08 Durian Payung Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TANjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

8. Narasumber 8

Nama : Izrin Sya'bani

Tempat/tanggal lahir : Tanjungkarang, 16 Desember 1965.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.17 Rawa Laut, Enggal
Bandar Lampung

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Wali/Isteri yang beralamat pada Jl. Sriwijaya GG.Melati No.06 RT.08 Enggal Bandar Lampung

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TANjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

9. Narasumber 9

Nama : Apriyadi

Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 18 April 1979.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Jl. Wibisono GG.Garuda tanjungkarang Timur
Bandar Lampung



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADIN INTAN
LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol Hendro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung
35131 Telp. (0721) 704030

- a. Kapan dan dimana Bapak menikah :

Jawab :

Saya menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dan melangsungkan pernikahan di Rumah Wali/Isteri yang beralamat pada Jl. Raden Fatah GG.Panca Jaya RT.08 Kaliawi Bandar Lampung

- b. Pada saat menikah, apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?

Jawab :

Saya melakukan sendiri pengurusannya sampai di KUA.

- c. Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama ?

Jawab :

Sudah sesuai sebagaimana diberlakukan di KUA TAnjungkarang Pusat Bandar Lampung.

- d. Apakah ada biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000,- ?

Jawab :

Tidak ada biaya lain, hanya biaya nikah diluar KUA yang sebesar Rp.600.000,-.

- e. Apakah ada pemberitahuan tentang kursus calon pengantin dari pihak KUA ?

Jawab :

Ada, saya dan isteri diberitahu serta datang untuk pengarahan calon pengantin dari pihak KUA.

- f. Setelah proses pembiayaan nikah telah selesai, apakah pihak KUA tepat waktu pada saat menikahkan bapak ?

Jawab :

Ya tepat waktu sesuai dengan permintaan waktu yang saya sampaikan kepada pihak KUA.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M.Ma'shum Ridho

NPM : 1221010001

Fakultas/Jurusan : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyah

Semester : XI (Sebelas)

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama” (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 2017

Responden

(.....)